

**UPAYA DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM  
MENARIKINVESTASI ASING UNTUK RENCANA  
PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)**

**Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :**

**MIFTAHUL HIDAYAH**

**07041281823119**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

### “UPAYA DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENARIK INVESTASI ASING UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU”

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Oleh :

**MIFTAHUL HIDAYAH**

07041281823119

Pembimbing I

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A

NIP.198904112019031013

Tanda Tangan



Tanggal

17-4-2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP.197705122003121003

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**“UPAYA DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM  
MENARIK INVESTASI ASING UNTUK RENCANA  
PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU”**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**MIFTAHUL HIDAYAH**

**07041281823119**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 10 Mei 2023**

**Pembimbing :**

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP, M.A  
NIP. 198904112019031013

**Tanda Tangan**



**Penguji :**

1. Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A  
NIP. 198405182018031001
2. Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int, M.A  
NIDK. 8948340022

**Tanda Tangan**



**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**



**Dekan FISIP-UNSRI,**  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
**NIP. 196601221990031004**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP.197705122003121003**

# LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Hidayah

NIM : 07041281823119

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menarik Investasi Asing Untuk Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepadasaya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 18 April 2023

Yang membuat pernyataan



1000  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAN  
TEMPEL  
011AKX385013638

Miftahul Hidayah

NIM. 070412818243119

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tugas akhir ini saya persembahkan kepada orang tua, keluarga besar, teman dan semua pihak yang terlibat sekaligus menjadi support system saya selama mengerjakan skripsi ini. Kalianlah yang menjadi alasan saya untuk terus semangat dalam menjalani hari dan menggapai cita.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik investasi asing untuk rencana pembangunan Ibu Kota Baru. Berangkat dari permasalahan Jakarta yang dianggap sudah tidak mumpuni lagi sebagai ibu kota, mulai dari masalah kepadatan penduduk, kemacetan, bencana alam, hingga sebutan Jawasentris, membuat presiden Jokowi akhirnya mengesahkan pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara hingga Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN akan menggunakan konsep yang belum pernah ada di Indonesia yaitu konsep *green, smart and sustainable city*. Pembangunan IKN hanya menggunakan 20% dana APBN dan sisanya akan melibatkan kerja sama dan investasi asing. Sebagian besar dana memerlukan investasi asing, maka dari itu dibutuhkan beberapa upaya Indonesia untuk menarik investor asing agar dapat menanamkan modalnya dalam proyek pembangunan IKN. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi dari Moons dimana untuk menarik investor asing, para aktor dapat menggunakan 3 elemen yaitu, Penggunaan Pengaruh Politik dan Relasi (Pemerintah, NGO, IGO), Penggunaan Aset Ekonomidan Relasi (Promosi Sumber Daya Daerah), dan Konsolidasi Iklim Politik dan Lingkungan Ekonomi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Hasil akhir dari penelitian ini menemukan bahwa aktor-aktor yang terdapat pada elemen tersebut sudah berhasil melakukan promosi dan sangat berpengaruh dalam menarik minat investor asing untuk dapat berinvestasi dalam Pembangunan IKN. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kesepakatan MoU, LoI, serta komitmen investasi dari beberapa calon investor.

**Kata Kunci :** Diplomasi Ekonomi, Ibu Kota Negara, Investasi, Promosi

Indralaya, 01 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing

Ketua Jurusan Hubungan Internasional



**Ferdiansyah Rivai, S.IP, M.A**  
NIP. 198904112019031013



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
NIP.197705122003121003

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze Indonesia's economic diplomacy efforts in attracting foreign investment for the development plan for the New Capital City. Departing from the problem of Jakarta which is considered no longer qualified as a capital city, starting from the problem of overcrowding, congestion, natural disasters, to the designation Jawacentric, President Jokowi finally authorized the transfer of the Indonesian capital from Jakarta to Penajem Paser Utara to Kutai Kertanegara in East Kalimantan. . The development of IKN will use a concept that has never existed in Indonesia, namely the concept of a green, smart and sustainable city. The development of IKN only uses 20% of APBN funds and the rest will involve cooperation and foreign investment. Most of the funds require foreign investment, therefore several efforts are needed by Indonesia to attract foreign investors so they can invest in IKN development projects. This study uses the concept of economic diplomacy from Moons where to attract foreign investors, actors can use 3 elements, namely, Use of Political Influence and Relations (Government, NGOs, IGO), Use of Economic Assets and Relations (Promotion of Regional Resources), and Consolidation of the Political Climate and the right Economic Environment. This study uses descriptive methods and data collection techniques in the form of literature studies and interviews. The final results of this study found that the actors contained in these elements had succeeded in carrying out promotions and were very influential in attracting foreign investors to be able to invest in IKN development. This is evidenced by the existence of several MoU agreements, LoIs, as well as investment commitments from several potential investors.*

*Keywords: Economic Diplomacy, IKN, Investment, Promotion*

Indralaya 01 May 2023

Acknowledge by,

**Advisor**



**Ferdiansyah Rivai, S.IP, M.A**  
**NIP. 198904112019031013**

**Approved by,  
Head of Departemernt**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP.197705122003121003**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan semesta alam Allah SWT. yang telah memberi saya kesempatan, waktu dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Bapak Prof Dr.Ir.H. Anis Assegaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, memberi semangat serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP, M.A dan Ibu Maudy Noor Fadhliha S.Hub.Int,M.A selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan arahan serta masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Hubungan Internasional, civitas akademik, Mbak Siska Ari Budi selaku admin jurusan yang telah banyak membantu dan mengurus segala urusan dan proses pemberkasan penulis.
8. Bapak Billy Wibisono selaku staff di Kemenlu yang sudah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara dan membantu penulis dalam mendapatkan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tua tercinta, Ayah Arpani dan Ibu Misrawati yang selalu mendukung dan memberikan semangat luar biasa serta senantiasa memberikan doa agar diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi. Kepada kakak A.Richard Victorian yang selalu memberi motivasi, adik Annisa Zakiyah dan Salman Alfarisi yang sudah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman sekaligus saudara yang selalu menemani dan memberi tempat berteduh, Niken Sri Ramadhani, Mentari, Hanna Hafizoh, Putri Nevirra dan Ayu Anita. Teruntuk Penyemangat dikala sedih dan kebingungan kak Agus, Terimakasih atas moment yang sudah kalian berikan selama masaperkuliahan.

Terimakasih karena kehadiran kalian adalah mood booster dikala stress selama penggarapan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penulis selama penulisan skripsi ini. Demikian, penulis berhadap agar sripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....         | ii   |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....          | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                    | iv   |
| ABSTRAK .....                                | v    |
| <i>ABSTRACT</i> .....                        | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                         | vii  |
| DAFTAR ISI.....                              | x    |
| DAFTAR TABEL.....                            | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                          | xii  |
| DAFTAR SINGKATAN .....                       | xiii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1.1.Latar Belakang .....      | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah.....      | 9 |
| 1.3.Tujuan Penelitian .....   | 9 |
| 1.4.Manfaat Penelitian .....  | 9 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis ..... | 9 |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1.4.2. Manfaat Praktis ..... | 9 |
|------------------------------|---|

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>2.1. Penelitian Terdahulu.....</b>            | <b>11</b> |
| <b>2.2. Kerangka Konsep/Landasan Teori .....</b> | <b>19</b> |
| 2.2.1. Konsep Diplomasi Ekonomi.....             | 19        |
| <b>2.3. Alur Pemikiran.....</b>                  | <b>25</b> |
| <b>2.4. Argumentasi Utama .....</b>              | <b>26</b> |

## **BAB III METODE PENELITIAN**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3.1. Desain Penelitian .....</b>       | <b>27</b> |
| <b>3.2. Definisi Konsep.....</b>          | <b>28</b> |
| 3.2.1. Diplomasi Ekonomi .....            | 28        |
| 3.2.2. Investasi Asing.....               | 28        |
| <b>3.3. Fokus Penelitian .....</b>        | <b>28</b> |
| <b>3.4. Unit Analisis .....</b>           | <b>30</b> |
| <b>3.5. Jenis dan Sumber Data .....</b>   | <b>31</b> |
| 3.5.1. Jenis Data.....                    | 31        |
| 3.5.2. Sumber Data .....                  | 31        |
| <b>3.6. Teknik Pengumpulan Data .....</b> | <b>32</b> |
| <b>3.7. Teknik Keabsahan Data.....</b>    | <b>32</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>3.8. Teknik Analisa Data.....</b>                             | <b>33</b> |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>                           |           |
| <b>4.1. Diplomasi Ekonomi di Indonesia.....</b>                  | <b>34</b> |
| <b>4.2. <i>Master Plan</i> Pembangunan Ibu Kota Negara .....</b> | <b>36</b> |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                                |           |
| <b>5.1. Penggunaan Pengaruh Politik dan Relasi .....</b>         | <b>45</b> |
| 5.1.1. Pemerintah .....  | 46        |
| 5.1.2. Non-Governmental Organization (NGO) .....                 | 54        |
| 5.1.3. International Governmental Organization (IGO) .....       | 55        |
| <b>5.2. Penggunaan Aset Ekonomi dan Relasi.....</b>              | <b>61</b> |
| 5.2.1. Promosi Sumber Daya Daerah.....                           | 65        |
| <b>5.3. Konsolidasi Iklim Politik dan Iklim Ekonomi .....</b>    | <b>72</b> |
| 5.3.2 Iklim Politik dan Ekonomi Indonesia. ....                  | 73        |
| 5.3.2. Kebijakan Pemerintah .....                                | 74        |
| <b>BAB VI PENUTUP</b>  |           |
| <b>6.1. Kesimpulan.....</b>                                      | <b>82</b> |
| <b>6.2. Saran .....</b>  | <b>85</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                      | <b>86</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>92</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2019-2021..... | 1  |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                               | 11 |
| Tabel 2.2 Alur Pemikiran .....                                     | 25 |
| Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....                                   | 28 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 4.1 Peta Ibu Kota Negara.....  | 36 |
| Gambar 4.2 Zonasi Ibu Kota Negara.....  | 40 |
| Gambar 5.1 Penandatanganan MoU Terkait Kerja Sama Pemindahan IKN dengan<br>Korea Selatan, di Busan, Korea Selatan.....              | 47 |
| Gambar 5.2 Pertemuan Bilateral Presiden dan Duta Besar dengan Pengusaha dan<br>Investordari UEA, di Abu Dhabi.....                  | 49 |
| Gambar 5.3. Penyerahan 11 Letter of Intent investor Malaysia kepada Ketua<br>Otorita IKN di Istana Bogor, Jawa Barat.....           | 52 |
| Gambar 5.4 Presiden Jokowi Menghadiri Pertemuan <i>Partnership for Global<br/>Infrastructure and Investment</i> (PGII) di Bali..... | 59 |
| Gambar 5.5 Peta Provinsi Kalimantan Timur.....  | 62 |
| Gambar 5.6 Presiden Jokowi Menghadiri <i>Market Sounding</i> IKN “Sejarah<br>Peradaban Baru” di Jakarta.....                        | 67 |
| Gambar 5.7 Kepala Otorita IKN mempromosikan potensi IKN dalam acara GICC<br>di Seoul, Korea Selatan.....                            | 70 |

## DAFTAR SINGKATAN

|          |   |
|----------|---|
| ADB      | : <i>Asian Development Bank</i>                       |
| ALKI II  | : Alur Laut Kepulauan Indonesia II                    |
| APBN     | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara              |
| ASN      | : Aparatur Sipil Negara                               |
| B20      | : <i>Bussiness of Twenty</i>                          |
| Bappenas | : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional              |
| BKPM     | : Badan Koordinasi Penanaman Modal                    |
| BPS      | : Badan Pusat Statistik                               |
| BUMN     | : Badan Usaha Milik Negara                            |
| CEPA     | : <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> |
| CIA      | : <i>Comprehensive Investment Agreement</i>           |
| CORE     | : <i>Center of Reform on Economics</i>                |
| CPO      | : <i>Crude Palm Oil</i>                               |
| Dubes    | : Duta Besar  |
| EBT      | : Energi Baru dan Terbarukan                          |
| EPA      | : <i>Economic Partnership Agreement</i>               |
| ESG      | : <i>Enviromental, Social and Governance</i>          |
| FMM      | : <i>Foreign Ministers Meeting</i>                    |
| FSB      | : <i>Financial Stability Board</i>                    |
| FTA      | : <i>Free Trade Area</i>                              |
| G7       | : <i>Group of Seven</i>                               |
| G20      | : Group of Twenty                                     |
| GICC     | : <i>Global Infrastructure Cooperation Conference</i> |

|         |  |
|---------|--|
| ICAK    | : <i>International Contractors Association of Korea</i>                    |
| IGO     | : <i>Inter-Govermental Organization</i>                                    |
| IK-CEPA | : <i>Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>      |
| IKN     | : Ibu Kota Negara  |
| ILO     | : <i>International Labour Organization</i>                                 |
| IMF     | : <i>International Monetary Fund</i>                                       |
| INA     | : <i>Indonesia Investment Authority</i>                                    |
| IPTEK   | : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi   |
| IsDB    | : <i>Islamic Development Bank</i>  |
| K-IKN   | : Kawasan Ibu Kota Negara  |
| KADIN   | : Kamar Dagang dan Industri  |
| KEK     | : Kawasan Ekonomi Khusus   |
| Kemlu   | : Kementerian Luar Negeri  |
| KIND    | : <i>Korea Overseas Infrastructure &amp; Urban Development Corporation</i> |
| KIPP    | : Kawasan Inti Pemerintahan  |
| Korsel  | : Korea Selatan  |
| KPBU    | : Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha                                 |
| KTT     | : Konferensi Tingkat Tinggi  |
| LoI     | : <i>Letter of Intent</i>  |
| MICE    | : <i>Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions</i>                 |
| MOLIT   | : <i>Ministry Of Land Infrastructure and Transport</i>                     |
| MoU     | : <i>Memorandum of Understanding</i>                                       |
| NGO     | : <i>Non-Govermental Organization</i>                                      |
| OECD    | : <i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i>             |

|         |   |
|---------|---|
| OSS-RBA | : <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>       |
| PBB     | : Perserikatan Bangsa-Bangsa                                |
| PDB     | : Pendapatan Domestik Bruto                                 |
| PGII    | : <i>Partenrship for Global Insfracture and Investement</i> |
| PLTA    | : Pembangkit Listrik Tenaga Air                             |
| PLTM    | : Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro                      |
| PLTS    | : Pembangkit Listrik Tenaga Surya                           |
| POLRI   | : Polisi Republik Indonesia                                 |
| Posco   | : <i>Pohang Iron and Steel Company</i>                      |
| PPh     | : Pajak Penghasilan   |
| PTA     | : <i>Preferential Trade Agreement</i>                       |
| PUPR    | : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                       |
| RPJMN   | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional              |
| RUED    | : Rencana Umum Energi Daerah                                |
| TKA     | : Tenaga Kerja Asing  |
| TNI     | : Tentara Nasional Indonesia                                |
| UEA     | : Uni Emirat Arab   |
| UMKM    | : Usaha Mikro Kecil Menengah                                |
| UU      | : Undang-Undang   |
| WEF     | : <i>World Economic Forum</i>                               |
| WHO     | : <i>World Health Organization</i>                          |
| WNA     | : Warga Negara Asing  |
| WTO     | : <i>World Trade Organization</i>                           |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Belakangan ini muncul isu-isu hangat di masyarakat dan pemerintah mengenai upaya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di daerah Kutai Kertanegara hingga Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara (IKN) sebenarnya merupakan salah satu wacana pemerintah yang sudah direncanakan sejak lama yang dimulai pada tahun 1990-an pada masa orde baru. Pada masa itu, presiden Soeharto ingin memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, akan tetapi akhirnya tidak terlaksana. Wacana ini kemudian muncul kembali dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan hasilnya sama, hanya sekedar wacana semata. Akhirnya pada tahun 2017, pembicaraan mengenai pemindahan ibu kota kembali muncul dibawah pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi). Bedanya, saat ini pemindahan IKN kemungkinan besar tidak sekedar wacana, tetapi sudah mulai digarap serius oleh pemerintahan Jokowi,hal ini ditandai dengan dimasukkannya rencana pemindahan IKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Ayundari, 2022).

Ada beberapa permasalahan yang menjadi alasan mengapa pemindahan IKN harus segera dilakukan.Pertama, yaitu masalah kepadatan penduduk.Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1.Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2019-2021 (jiwa/km<sup>2</sup>)**

| No | Provinsi    | 2019   | 2020   | 2021   |
|----|-------------|--------|--------|--------|
| 1. | DKI Jakarta | 15.900 | 15.907 | 15.978 |

|   |               |       |       |       |
|---|---------------|-------|-------|-------|
| 2 | Jawa Barat    | 1.394 | 1.365 | 1.379 |
| 3 | Banten        | 1.338 | 1.232 | 1.248 |
| 4 | DI Yogyakarta | 1.227 | 1.171 | 1.185 |
| 5 | Jawa Tengah   | 1.058 | 1.113 | 1.120 |

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, selama 3 tahun berturut-turut DKI Jakarta menempati posisi pertama dalam hal kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan penuhnya pemukiman yang kemudian menciptakan berbagai permasalahan seperti masalah lingkungan, kemacetan, ketiadaan lahan untuk ruang publik, kecilnya peluang lapangan pekerjaan, pengangguran, hingga meningkatnya angka kriminalitas. (Rahmatulloh, 2017) Masalah kedua, yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan parah di Jakarta berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Menurut Kementerian Perhubungan, total kerugian akibat kemacetan di wilayah Jabodetabek di tahun 2021 mencapai 71,4 triliun rupiah per tahun. Kerugian ini disebabkan oleh pemborosan bahan bakar minyak serta melambatnya mobilitas dikarenakan produktivitas masyarakat terhambat akibat terjebak kemacetan (CNN Indonesia, 2021). Masalah ketiga, yaitu pulau Jawa khususnya DKI Jakarta dikenal sebagai pusat segalanya, baik itu perekonomian, pemerintahan, pendidikan dan lainnya yang menyebabkan pembangunan lebih tersentralisasi di Pulau Jawa atau sering disebut sebagai Jawasentris. Keadaan ini menciptakan kesenjangan perekonomian dan pembangunan antara Pulau Jawa dan Pulau-Pulau Indonesia lainnya. Kemudian masalah keempat, dilihat dari segi potensi bencana, pulau Jawa sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Terlebih lagi Jakarta juga berada di kawasan *ring of fire* yang merupakan wilayah yang dikelilingi oleh aktivitas vulkanik. Hal ini juga diikuti dengan semakin

parahnya masalah lingkungan yang ada di Jakarta, seperti pencemaran air, dan polusi udara. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban Jakarta sudah terlalu berat, sehingga presiden Jokowi menyatakan ingin memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pada tanggal 15 Februari 2022, Rencana pembangunan Ibu Kota Negara ini kemudian resmi dimasukkan dalam undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), dan hal tersebut menandai dimulainya pembangunan ibu kota baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. (Saputra et al., 2021)

Undang-undang IKN mengatur mengenai strategi dalam proses pembangunan ibu kota negara, dimana pemerintah akan melakukan 5 tahapan yang dimulai dari tahun 2022 – 2045. Dalam setiap tahapan, pemerintah akan berupaya untuk mengedepankan pelestarian alam, inklusivitas dari aspek penduduk serta menjaga kondisi alam dan hutan Kalimantan. Adapun 5 tahapnya sebagai berikut :

1. Tahap I (2022-2024)
  - a. Pembangunan kompleks istana Kepresidenan,
  - b. Perkantoran Pemerintah,
  - c. Perumahan ASN, Personil Hankam,
  - d. Telekomunikasi, Kelistrikan/Energi dan konektivitas/transportasi.
2. Tahap II (2025 – 2029)
  - a. Infrastruktur dan lingkungan (bandara, bendungan, dan lain-lain)
  - b. Pengembangan kawasan IKN
  - c. Perluasan kawasan (perkantoran, industri, universitas, hotel)
  - d. Pertahanan (Polri, BIN, BSSN, Kemhan)
3. Tahap III (2030 – 2034)
  - a. Infrastruktur dan lingkungan (sistem angkutan umum, pengelolaan air)
  - b. Pengembangan kawasan IKN

- c. Perluasan beberapa kawasan serta pertahanan
4. Tahap IV (2035-2039)
- a. Infrastruktur dan lingkungan (Kereta Api Regional, sistem pengelolaan air limbah, pembangunan solar farm, dan lain-lain)
  - b. Pengembangan 4 kawasan (KIPP tahap 2A, IKN Barat, IKN Timur dan kawasan utara)
  - c. Perluasan beberapa kawasan serta pertahanan.
5. Tahap V (2040-2045)
- a. Infrastruktur dan lingkungan (Infrastruktur dan transportasi tahap akhir dan pengembangan potensi bendungan multi guna).

Saat ini (2022-2024) pemerintah sudah membentuk Badan Otorita IKN yang akan diberikan tugas untuk melakukan proses perencanaan, penganggaran serta pembangunan IKN melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait.(Vernando, 2022)

Dalam upaya memindahkan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah tentunya memerlukan biaya yang sangat besar untuk merealisasikan rencana tersebut. Berdasarkan data dari kementerian keuangan, pemerintah menetapkan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru sekitar Rp. 466 Triliun – Rp. 486 Triliun hingga 2045 mendatang. Dari total tersebut, APBN hanya akan menanggung sekitar 20% atau sekitar Rp.88,54 triliun – Rp.92,34 Triliun. Selebihnya sekitar 80% akan melibatkan investasi swasta untuk mendukung pembangunan IKN. Menurut *Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia, dalam pembangunan IKN sebaiknya pemerintah tidak menggunakan APBN dalam jumlah yang besar, hal ini dikarenakan kondisi perekonomian Indonesia yang masih belum stabil. Masih banyak agenda-agenda prioritas yang harus lebih dulu diselesaikan oleh pemerintah, salah satunya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang 2 tahun belakangan ini melanda dunia termasuk Indonesia(Anggela, 2022).Pemerintah juga harus

mengalokasikan dana untuk pembayaran utang pemerintah yang terus meningkat, dimana sekarang sudah mencapai 6.300 triliun rupiah dan diperkirakan mencapai 10.000 triliun rupiah di 2024. Kemudian jumlah penerimaan negara di sektor pajak pun cenderung mengalami penurunan diukur dari tax ratio yang semula 10,2 % di 2018, menjadi 7,2% di 2020 (Librianty, 2021). Ditambah lagi saat ini, keadaan perekonomian global juga sedang dilanda ketidakpastian dimana banyak negara besar yang terancam jatuh ke jurang resesi termasuk Indonesia. Keadaan perekonomian yang sedang 'gelap' ini tentunya harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun skala prioritas dalam penggunaan anggaran belanja negara. Kondisi ini menjadi alasan mengapa APBN tidak dapat menjadi sumber utama untuk pembangunan IKN. Akan tetapi, ditengah ancaman perekonomian yang tidak stabil, sejatinya proses pembangunan IKN ini akan dilakukan secara bertahap yang dimulai dari tahun 2024-2045, sehingga pemerintah masih memiliki banyak waktu untuk membangun ibu kota baru. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan IKN, pemerintah membutuhkan sekitar 80% anggaran non APBN seperti investasi swasta, BUMN, dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Dalam hal ini, investasi asing dapat menjadi salah satu sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah (Lidya Julita, 2020).

Secara historis, ada beberapa negara yang berhasil melakukan pemindahan ibu kota, seperti Nigeria yang berhasil memindahkan ibukota dari Lagos ke Abuja, kemudian ada Brazil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan Australia yang memindahkan ibu kotanya dari Melbourne ke Canberra. Proses pemindahan ibu kota Brasil mungkin dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia dalam memindahkan ibu kota baru. Brazil merupakan salah satu negara Amerika Selatan yang dari segi kondisi dan ekonominya memiliki kemiripan dengan Indonesia. Keduanya sama-sama memiliki jumlah penduduk di atas 200 juta jiwa dan merupakan negara yang masih

berkembang. Keputusan Brazil untuk memindahkan ibu kota-nya dikarenakan Rio DeJaneiro sudah menjadi ibukota selama ratusan tahun yang mengakibatkan kota ini sudah terlalu penuh oleh penduduk. Kemudian masalah kemacetan, lahan yang semakin minim, terlebih lagi ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin besar juga menjadi dasar pemindahan ibu kota Brazil. Akhirnya dalam waktu 5 tahun di bawah kepemimpinan presiden Juscelino, Brazil berhasil memindahkan ibu kota-nya ke Brasilia pada tahun 1960. Dalam membangun Brasilia, pemerintah memanfaatkan investasi dan pinjaman asing, serta melakukan penghematan anggaran di berbagai sektor (Adryamarthanio, 2022). Pemindahan ibu kota ini dianggap berhasil, sebagaimana yang dikatakan oleh Duta Besar Brazil untuk Indonesia, Rubem Antonio Correa Barbosa yang menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Brasilia tidak berdampak buruk terhadap perekonomian Rio de Janeiro, justru Brasilia mengalami dampak positif, dikarenakan pemindahan ibu kota ini berhasil memicu pertumbuhan kota-kota kecil yang ada di sekitar Brasilia yang berakibat pada tumbuhnya industri dan pariwisata(Bappenas RI, 2019).Sama seperti Brazil, Indonesia dapat melakukan pemindahan ibu kota dengan skema yang sama yaitu dengan memanfaatkan investasi asing. Terlebih lagi ada beberapa alasan yang dapat menarik investor asing maupun lokal untuk dapat menanamkan uangnya pada proyek pembangunan IKN, diantaranya yakni desain IKN akan dibangun berbeda dari kota-kota lain di dunia. Konsep IKN akan dibangun dengan istilah *sustainable, environment city,forest city, green city* dan *smart city*.Prospek yang bagus bagi IKN adalah konsep *green energy*.Hal ini sangat memungkinkan dikarenakan Kalimantan memiliki sungai-sungai yang besar untuk dijadikan *Hydropower*. Sehingga industri-industri yang nantinya memerlukan listrik dengan kapasitas yang besar akan menjadi daya tarik tersendiri disana(Handoyo, 2022).Kemudian harga tanah di kawasan IKN dapat dikembangkan dengan investasi asing dengan harga yang cukup murah. Pemerintah juga akan membangun infrastruktur dasar di

wilayah pengembangan IKN Nusantara, seperti jalan, drainase, dan air baku. Kondisi tersebut tentunya akan menjadi daya tarik bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. (Andi M. Arief, 2022)

Pembangunan IKN tentunya menjadi salah satu proyek yang sangat potensial bagi para investor, baik untuk investor lokal maupun investor asing. Dalam upaya untuk menarik investasi asing, pemerintah Indonesia memerlukan kebijakan luar negeri yang dapat digunakan sebagai katalisator agar para investor asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu instrumen yang dapat dilakukan yaitu melalui diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas sebuah negara dalam melakukan negosiasi dengan negara lain untuk meningkatkan relasi dan mencapai kepentingan ekonomi (Killian, 2012). Tujuan utama dari diplomasi ekonomi yaitu mendorong peningkatan kerjasama di tiga sektor, yakni perdagangan (*Trade*), Investasi (*Investment*), dan Pariwisata (*Tourism*). Pembangunan IKN merupakan salah satu proyek pemerintah yang memerlukan biaya besar. Diplomasi ekonomi kemudian dapat menjadi alat bagi para aktor diplomasi untuk mendapatkan sokongan danayang nantinya akan digunakan untuk pembangunan IKN, dalam bentuk investasi asing. Terlebih lagi diplomasi ekonomi adalah salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri presiden Jokowi tahun 2019-2024, dimana ekonomi menjadi faktor penting dalam melakukan politik luar negeri. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan IKN, kegiatan diplomasi ekonomi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengajak negara lain agar dapat berinvestasi di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi, melalui penarikan investasi asing yang nantinya akan dialokasikan khusus untuk proses pembangunan ibu kota baru. (Surya & Bukhari, 2019)

Hingga awal tahun 2022, ada beberapa negara yang tertarik untuk berinvestasi di proyek IKN seperti Uni Emirat Arab, Jepang, Inggris, Taiwan dan Korea Selatan. Uni

Emirat Arab melalui Indonesia *Investment Authority* (INA) bahkan sudah merealisasikan komitmen investasinya sebesar US\$18 miliar atau Rp.257,04 triliun dari total Rp.636,88 triliun. Dari total investasi tersebut, US\$10 miliar atau Rp.142,8 triliun akan dialokasikan untuk proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia (Laksono, 2021). Selain itu pemerintah juga mengadakan beberapa pertemuan dengan para investor asing seperti perusahaan asal Taiwan, Hon Hai Precision Industry Company (Foxcon) dan Korea Selatan yakni Pohang Iron and Steel Company (Posco) untuk memperkenalkan ataupun menegosiasikan investasi terkait IKN (Andi M. Arief, 2022). Dilain sisi, ada juga perusahaan multinasional seperti Softbank asal Jepang juga sudah tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN sebesar US\$100 miliar di Indonesia, akan tetapi akhirnya gagal direalisasikan dikarenakan adanya masalah di perusahaan. Peristiwa sejenis ini tentunya akan menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan diplomasi. Berdasarkan tulisan diatas, proyek pembangunan Ibu Kota Baru tentunya memerlukan dana yang sangat besar. Selain APBN, pemerintah memerlukan investasi swasta termasuk investasi asing untuk keberlanjutan pembangunan IKN. Terlebih lagi pembangunan IKN akan dilakukan dengan mengusung tema *green energy*, yang kemungkinan dapat menambah daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan realisasi investasi asing salah satunya melalui jalan diplomasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melihat bagaimana upaya-upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik investasi asing untuk rencana pembangunan ibu kota baru.



## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana upaya pemerintah Indonesia menarik investasi asing untuk rencana pembangunan ibu kota baru?”**

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana upaya-upayapemerintah Indonesia melalui diplomasi ekonomi dalam menarik investasi asing untuk rencana pembangunan Ibu Kota Baru.

## **1.4..Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kajian dan referensi ataupun dapat menjadi tinjauan pustaka bagi akademisi jurusan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang tertarik untuk meneliti dan menulis mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menarik investasi asing untuk pembangunan ibu kota baru.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan, khususnya mengenai bagaimana upaya-upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menarik investasi asing untuk rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).Penelitian ini juga dapat meningkatkan dan mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis sebuah permasalahan. Hasilnya, penulis bisa belajar lebih banyak mengenai upaya pemerintah melalui instrumen diplomasi ekonomi, dimana hal ini akan menambah wawasan dan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi berupa pengetahuan kepada masyarakat mengenai Ibu Kota Baru yang saat ini disebut sebagai Nusantara. Kemudian penelitian ini juga akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menarik investor asing untuk dapat berinvestasi Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia sebagai pembuat regulasi mengenai upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik investasi asing untuk pembangunan ibu kota baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanio, V. (2022). *Sejarah Pemindahan Ibu Kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/23/150000179/sejarah-pemindahan-ibu-kota-brasil-dari-rio-de-janeiro-ke-brasilia?page=all#:~:text=Sejak 1763%2C Rio de Janeiro,negara ini dipindahkan ke Brasilia.>
- Alaydrus, H. (2023). *Anwar Ibrahim Tiba di RI, Siap Bahas IKN dengan Jokowi*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230108202553-4-403765/anwar-ibrahim-tiba-di-ri-siap-bahas-ikn-dengan-jokowi>
- Ali, F., & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aditama.
- Andi M. Arief. (2022). *Bahlil Beberkan Empat Negara Berkomitmen Investasi di IKN Nusantara*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/62d7c215a5c28/bahlil-beberkan-empat-negara-berkomitmen-investasi-di-ikn-nusantara>
- Anggela, N. L. (2022). *Ekonom: Pemerintah Jangan Kebanyakan Pakai APBN untuk Pembangunan Ibu Kota Baru*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220420/9/1524800/ekonom-pemerintah-jangan-keanyakan-pakai-apbn-untuk-pembangunan-ibu-kota-baru>
- Anggita, V. (2022). *Satu Dekade Diaspora Indonesia Dukung Pembangunan IKN Nusantara*. Swa.Co.Id. <https://swa.co.id/diaspora/satu-dekade-diaspora-indonesia-dukung-pembangunan-ikn-nusantara>
- Arum, R. (2021). *NGO Adalah: Definisi, Sejarah, Jenis, Peran, dan 5 Contohnya di Indonesia*. Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/ngo-adalah/>
- Asmara, C. G. (2022). *Jokowi “Jualan” IKN Hingga Raja Ampat Cs ke Investor UEA*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220701172228-4-352288/jokowi-jualan-ikn-hingga-raja-ampat-cs-ke-investor-uea>
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Astuty, F. (2018). ANALISIS INVESTASI ASING LANGSUNG DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen Prima*, VIII(II), 24–25.
- Ayundari. (2022). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. In *Djkn.Kemenkeu.Go.Id* (p. 1). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1).
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (jiwa/km2), 2019-2021*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/12/141/1/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>

- Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Naskah Akademik.
- Bappenas. (2021). Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. *Kementrian PPN/Bappenas*, 2–24.
- Bappenas RI. (2019). FMB 9 Pindah Ibu Kota Negara: Indonesia Belahar dari Pengalaman Brasil Pindahkan Ibu Kota Negara Ke Brasilia. *Bappenas RI*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/fmb-9-pindah-ibu-kota-negara-indonesia-belahar-dari-pengalaman-brasil-pindahkan-ibu-kota-negara-ke-brasilia/>
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2017). *The New Economic Diplomacy : Decision-making and negotiations in international economic relation*. Routlege.
- BKPM. (2021). *UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia*. Bkpm.Go.Id. <https://www2.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>
- BKPM. (2022). Kemudahan Berusaha dan Insentif Investasi di Ibu Kota Nusantara. *PPP In-Depts Knowledge Sharing*.
- BPS. (2023). *Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5%2C31 persen%2C lebih,Pergudangan sebesar 19%2C87 persen.>
- BUMN. (2022). *Erick: Alhamdulillah, Investor-investor UEA Optimistis Kerja sama dengan Indonesia*. Bumn.Go.Id. <https://bumn.go.id/index.php/media/press-conference/erick-alhamdulillah-investor-investor-uea-optimistis-kerja-sama-dengan-indonesia-6b>
- CNBC, R. (2023). *Otorita IKN Semringah Kantongi 11 Komitmen Investasi Malaysia*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230111210450-4-404805/otorita-ikn-semringah-kantongi-11-komitmen-investasi-malaysia>
- CNN Indonesia. (2021). *Kerugian Ekonomi Akibat Macet Jabodetabek Capai Rp71,4 T*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210428120006-92-635840/kerugian-ekonomi-akibat-macet-jabodetabek-capai-rp714-t>
- CNN Indonesia. (2022). *Jokowi Sebut Korsel Bakal Investasi US\$6,37 Miliar di IKN*. Cnnindonesia.Com.
- CNN Indonesia. (2023). *Basuki Ungkap Alasan Realisasi Investasi Swasta di IKN Masih Nihil*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230428150439-92-943120/basuki-ungkap-alasan-realisasi-investasi-swasta-di-ikn-masih-nihil>
- Dinas Perkebunan. (2020). *POTENSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*. Disbun.Kaltimprov.Go.Id. <https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/potensi-daerah-provinsi-kalimantan-timur>
- Dinas Perkebunan. (2021). *Kelapa Sawit*. Disbun.Kaltimprov.Go.Id. <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/kelapa-sawit>

- GICC. (2022). *GICC 2022: Opening Ceremony*. youtube.com. <https://www.youtube.com/watch?v=HooUQijQ8tQ>
- Handoyo. (2022). *Menilik Potensi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Baru*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/menilik-potensi-investasi-di-ibu-kota-negara-ikn-baru>
- Hazami, B. (2022). *Potensi Kaltim sebagai Penyuplai EBT IKN*. Kaltim Post. <https://kaltimpost.jawapos.com/kolom-pembaca/21/09/2022/potensi-kaltim-sebagai-penyuplai-ebt-ikn>
- Ihsanuddin. (2019). *Jokowi dan Presiden Korsel Bahas Kerja Sama Pemindahan Ibu Kota RI*. Nasional Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/19410411/jokowi-dan-presiden-korsel-bahas-kerja-sama-pemindahan-ibu-kota-ri>
- IKN. (2022a). *Market Sounding IKN: Sejarah Baru Peradaban Baru*. In *Youtube IKN Indonesia*.
- IKN. (2022b). *Menuju Visi Indonesia 2045: Kota Dunia Untuk Semua*. Ikn.Go.Id. <https://ikn.go.id/>
- Intan, G. (2022). *Ketika Jokowi Promosi IKN Nusantara ke Investor*. Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/ketika-jokowi-promosi-ikn-nusantara-ke-investor/6799562.html>
- Ismail, A. (2019). *NGO dalam Diplomasi Ekonomi: Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDG's) Poin Pengentasan Ketimpangan Sosial di Indonesia*. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1255>
- Kemendo. (2021). *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>
- Kemendo. (2022). *Pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII)*. Deputi7.Ekon.Go.Id. <https://www.deputi7.ekon.go.id/post/pertemuan-partnership-for-global-infrastructure-and-investment-pgii>
- Kementerian PPN. (2022). *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia*. 6(2).
- Kementerian PUPR. (2022). *Indonesia dan Korea Selatan Lanjutkan Kerja Sama Teknis Pemindahan Ibukota dan Pembangunan IKN Nusantara*. Pu.Go.Id. <https://pu.go.id/berita/indonesia-dan-korea-selatan-lanjutkan-kerja-sama-teknis-pemindahan-ibukota-dan-pembangunan-ikn-nusantara>
- Killian, P. M. E. (2012). *Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia*. *Global & Strategis*, 6(2), 170–185.
- Kompas. (2022). *Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/07/11453641/rangkaian-kegiatan-menlu-retno-di-fmm-g20-bahas-isu-dunia-dan-investasi-ikn>

- Kurniawan, A. (2016). Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Thailand terhadap Pasar Timur Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(3), 254. <https://doi.org/10.22146/jsp.13081>
- Laksono, M. Y. (2021). *UEA Disebut Investasi Rp 142 Triliun di IKN, Ini Sektor yang Bakal Dibangun*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/11/203408621/uea-disebut-investasi-rp-142-triliun-di-ikn-ini-sektor-yang-bakal?page=all>
- Laurensius, Setiani, M. F. D. A., Harryes, R. K., & Ras, A. R. (2021). Pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy Untuk Mendukung Blue Economy. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 70.
- Librianty, A. (2021). *Anggaran Tak Cukup, Pengamat Sebut Ibu Kota Baru Cuma Jadi Beban Negara*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4534722/anggaran-tak-cukup-pengamat-sebut-ibu-kota-baru-cuma-jadi-beban-negara>
- Lidya Julita. (2020). *Mantap, Banyak Investor Kesengsem Proyek Ibu Kota Baru RI*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200609152140-4-164149/mantap-banyak-investor-kesengsem-proyek-ibu-kota-baru-ri>
- Linovhr. (2021). *Apa itu NGO? Inilah pengertian,tujuan dan jenisnya*.
- Mariyadi, A., & Wicaksono, B. T. (2018). *Lingkungan Ekonomi*. Binus.Ac.Id. <https://bbs.binus.ac.id/ibm/2018/04/lingkungan-ekonomi/#:~:text=Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi,atau beban dari bisnis tersebut.>
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Penerbit LP3ES.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press
- Mochamad Yani, Y. (2009). Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy. *Sosiohumaniora*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v11i1.5575>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, M. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi*, 16(1).
- Noviani, A. (2023). *WEF 2023 Davos: BKPM Buka Pavilion Indonesia, Tawarkan Proyek IKN*. Ekonomi.Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230117/9/1618940/wef-2023-davos-bkpm-buka-pavilion-indonesia-tawarkan-proyek-ikn>
- Nugroho, A. C. (2022). *Kunjungi Korsel, Kepala Otorita IKN Ajak Investor Asing Bangun IKN Nusantara*. Ekonomi.Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220902/45/1573677/kunjungi-korsel-kepala-otorita-ikn-ajak-investor-asing-bangun-ikn-nusantara>
- Nurdifa, A. R. (2022). *Top! 183 Investor Malaysia Minat Investasi di IKN, Ada Startup*.

- Ekonomi.Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221201/45/1604142/top-183-investor-malaysia-minat-investasi-di-ikn-ada-startup>
- Perdana, H. A. (2023). *KADIN Promosikan IKN Nusantara di World Economic Forum 2023*. Idntimes.Com. <https://www.idntimes.com/business/economy/hana-adi-perdana-1/kadin-promosikan-ikn-nusantara-di-world-economic-forum?page=all>
- Perekonomian, K. K. B. (2019). *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*. Ekon.Go.Id. [https://www.ekon.go.id/profil/1/tentang-kami#:~:text=Kementerian Keuangan \(Sri Mulyani Indrawati,Kementerian Perdagangan \(Zulkifli Hasan\)%3B](https://www.ekon.go.id/profil/1/tentang-kami#:~:text=Kementerian Keuangan (Sri Mulyani Indrawati,Kementerian Perdagangan (Zulkifli Hasan)%3B)
- Prahu. (2020). *PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG KAYA DENGAN SUMBER DAYA*. Prahu-Hub.Com. <https://www.prahu-hub.com/provinsi-kalimantan-timur-yang-kaya-dengan-sumber-daya/>
- Prawiro, M. (2022). *Arti Konsolidasi: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Perusahaan Konsolidasi*. Maxmanroe.Com. <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/arti-konsolidasi-adalah.html>
- Purnama, I. D. (2022). *Bertemu 17 Kepala Negara G20, Jokowi: Potensi Investasi di IKN Rp322 Triliun*. Okezone.Com. <https://economy.okezone.com/read/2022/11/15/470/2708241/bertemu-17-kepala-negara-g20-jokowi-potensi-investasi-di-ikn-rp322-triliun>
- Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1).
- Rah. (2022). *Di Forum B20, Airlangga Pamer RI Bakal Punya Ibu Kota Baru*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221114103203-4-387613/di-forum-b20-airlangga-pamer-ri-bakal-punya-ibu-kota-baru>
- Rahmatulloh. (2017). Dinamika Kependudukan di Ibukota Jakarta (Deskripsi Perkembangan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Penduduk di DKI Jakarta). *Genta Mulia*, VIII(2), 54–67.
- Ridwan, M. (2022). *Oleh-Oleh G20, Jepang dan Indonesia Sepakati Kerja Sama di IKN*. Ekonomi.Bisnis.Com.
- Rosana, F. C. (2022). *Otorita Akan Tawarkan Proyek IKN ke Investor Besok Malam*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1646163/otorita-akan-tawarkan-proyek-ikn-ke-investor-besok-malam>
- Sabaruddin, S. S. (2017). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 69. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90>
- Sandi, F. (2023). *“Dijual” di Mana-mana, Ini Investor Minat Garap IKN*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230116114658-4-405715/dijual-di-mana-mana-ini-investor-minat-garap-ikn>
- Saputra, S. D., Gabriel, T., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemindehan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindehan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam

- Paser Utara) Strategy Analysis Relocation Of The Capital Cit. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7, 192.
- Setkab. (2022). *Keberhasilan Keketuaan Indonesia Pada Forum G20*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/keberhasilan-keketuaan-indonesia-pada-forum-g20/>
- setneg. (2022). *Sambutan Presiden pada Kegiatan Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru*. Setneg.Go.Id. [https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan\\_presiden\\_pada\\_kegiatan\\_ibu\\_kota\\_nusantara\\_sejarah\\_baru\\_peradaban\\_baru\\_selasa](https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_pada_kegiatan_ibu_kota_nusantara_sejarah_baru_peradaban_baru_selasa)
- Sidik, M. (2017). *Pengelolaan Aset dan Kebijakan Fiskal*. Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-dan-Kebijakan-Fiskal.html>
- Sulistia Wargi. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi Melalui Diplomasi Ekonomi Dalam Upaya Untuk Menguasai Pasar Halal Dunia. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 320–341. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.228>
- Supriyadi, & Purnamasari, A. I. (2021). GAGASAN PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 260.
- Surya, A., & Bukhari, A. S. (2019). Peluang Dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia Dengan Negara-Negara Visegrad. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 17(1), 13–18. <https://doi.org/10.34010/miu.v17i1.2229>
- Syahputra, E. (2022). *Setelah UEA Lirik IKN, Siapa Lagi nih yang Minat Investasi?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221025132954-4-382355/setelah-uea-lirik-ikn-siapa-lagi-nih-yang-minat-investasi#:~:text=Dalam konferensi pers Realisasi Investasi,atau setara Rp 312 triliun.>
- Triwahyuni, D. (2007). Pengertian dan Penggolongan Organisasi Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3.
- Vernando, Z. (2022). *Skema KPBU, Apa Perannya dalam Mendukung Pembangunan IKN*. KPBU KEMENKEU. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn>
- Wibisono, B. (2023). *Peran NGO dalam Menarik Investasi Asing ke Proyek IKN*.
- Widiatmaja, A., & Albab, U. (2019). Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan [Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 77–93. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1313>
- Yanwardhana, E. (2022). *Saat Menteri Jokowi “Jual” IKN di Malaysia, Begini Janjinya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221130152736-4-392549/saat-menteri-jokowi-jual-ikn-di-malaysia-begini-janjinya>